

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan munculnya berbagai faktor, salah satunya adalah meningkatnya produksi sampah. Sampah merupakan permasalahan lingkungan utama bagi berbagai negara dan Indonesia tidak luput dari hal tersebut. Sampah plastik yang sering kita temukan perlu penanganan yang bijak melalui kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Salah satu penanganan terkait sampah adalah dengan daur ulang. Daur ulang adalah mengelola sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan mengubah sampah agar tidak berdampak pada lingkungan (Kurniasih, 2017: 39). Daur ulang akan memiliki pengaruh terhadap masyarakat sehingga menampakkan perilaku masyarakat yang semakin peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Masyarakat perlu menaruh perhatian lebih terhadap lingkungannya, karena lingkungan yang terjaga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

Identifikasi mengenai sudut pandang pengelolaan sampah oleh Tallei, dkk bahwa dalam “UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah” yaitu pola pikir masyarakat seharusnya diubah dengan memandang sampah sebagai sesuatu yang bernilai dan bermanfaat (Heruman dkk, 2016: 137). Implementasi pada “Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” adalah masyarakat harus meninggalkan cara pembuangan sampah yang lama dan menggantinya melalui

edukasi dengan mengategorikan sampah serta membuatnya menjadi sesuatu yang bernilai sehingga dapat mengembangkan ekonomi masyarakat. Meninjau dari pernyataan tersebut maka hal utama yang perlu dilakukan agar meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah adalah melalui edukasi seperti mengategorikan atau memisahkan sampah kering maupun basah sehingga lingkungan akan bersih dan terhindar dari berbagai penyakit.

Data sampah yang dihimpun oleh Data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 (Portal Informasi Indonesia, 2019) bahwa Indonesia memiliki sampah plastik hingga 64 juta ton/tahun. Laut pun juga menjadi sasaran tempat pembuangan sampah dengan 32 juta ton sampah. Selain itu 85.000 ton kantong plastik terbuang ke lingkungan. Data tersebut akan semakin meningkat jika masyarakat tidak peduli dengan isu lingkungan yang terjadi dan tetap menggunakan barang-barang yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Masyarakat Depok menghasilkan 1.400 ton/hari sampah (Nurdiansyah, 2020). Saat ini, Kota Depok hanya memiliki satu TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang berlokasi di Cipayung sehingga penumpukan sampah tidak dapat dikendalikan.

Dukungan yang kuat dalam mengurangi plastik seharusnya tidak hanya pada penggunaan plastik sekali pakai, akan tetapi meluas hingga penggunaan jangka panjang (Dilkes-Hoffman dkk, 2019: 3–7). Adanya program bank sampah sebagai konsep pemberdayaan sampah yang mengajak masyarakat untuk memisahkan dan mengumpulkan sampah dengan tujuan untuk mengupayakan peran perempuan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, keberadaan bank sampah sebagai strategi dalam

menerapkan pemilahan sampah, juga sebagai upaya dalam mengurangi sampah di lingkungan. Bank sampah merupakan salah satu hal inovatif untuk membiasakan masyarakat dalam memilah sampah (Reni Sri Hapsari dkk, 2019: 227).

Bank sampah di Kota Depok tersedia di berbagai wilayah. Pendirian bank sampah memiliki konsep 3R, yang dikenal dengan *reduce* sebagai upaya mengurangi segala hal yang dapat mengakibatkan penumpukan sampah, *reuse* sebagai upaya pemanfaatan sampah yang masih bisa digunakan sesuai dengan fungsinya, dan *recycle* adalah dengan mendaur ulang sampah sehingga menghasilkan produk baru yang memiliki nilai (Shentika, 2016: 94–95). Oleh sebab itu, pemerintah setempat berupaya memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi volume sampah. Hal ini didukung oleh Stern, Kollmuss, dkk yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah sebagai salah satu cara dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Li dkk, 2019: 29). Dengan kata lain, fungsi bank sampah selain untuk mengurangi sampah melainkan juga dapat menjadi salah satu pemberdayaan masyarakat.

Pada hakikatnya perempuan dan rumah tangga sulit untuk dipisahkan karena sebagian sampah berasal dari rumah tangga maka diharapkan perempuan dan keluarga memiliki peran untuk mengendalikan lingkungan (Ika Wijayanti dkk, 2019: 42). Fakta yang terjadi di masyarakat bahwa perempuan sebagai penggerak, pendorong, pemberi pengaruh, atau dapat disebut sebagai “*Influencer*” memiliki peran penting dalam menggerakkan program bank sampah. Maksud dari *influencer* dalam menggerakkan program bank sampah adalah ibu-ibu kader RW 06 yang merangkap menjadi aktivis bank sampah. Program bank sampah yang digerakkan

oleh para perempuan menjadi daya tarik sendiri di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, perempuan kerap lebih kooperatif dan bersikap simpati yang menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap lingkungan cenderung lebih kuat. Hal serupa juga dijelaskan oleh Lopes-Mozquera dkk (Lopes-Mozquera, 2019: 30) bahwa kaum perempuan, kaum muda berpendidikan tinggi dengan tingkat pendapatan yang baik, pasangan yang sudah menikah, dan penduduk kota cenderung menunjukkan tingkat kepedulian terhadap lingkungan yang lebih baik. Kategori tersebut meyakini bahwa kelestarian lingkungan akan bermanfaat untuk generasi selanjutnya, sehingga setiap orang sudah semestinya memiliki sikap peduli terhadap lingkungan.

Bank Sampah RW 06 Kelurahan Tugu, Depok memiliki aktivis yang seluruhnya adalah ibu rumah tangga. Sebagai aktivis bank sampah sudah semestinya mengajak masyarakat untuk memisahkan sampah plastik yang ada di rumah dan mengumpulkannya ke bank sampah sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk keberlangsungan bank sampah. Para perempuan yang menjadi aktivis bank sampah memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat dan keluarga untuk peduli terhadap lingkungan.

Berdasarkan fenomena diatas, alasan peneliti mengangkat topik dalam penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana gerakan *influencer* dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah. Gerakan *influencer* yang dimaksud adalah para perempuan. Mengapa perempuan, karena relasi antara perempuan dan rumah tangga tidak dapat dipisahkan, sehingga perempuan diharapkan berperan untuk ikut serta dalam mengendalikan lingkungan. Oleh

karena itu, peneliti tertarik untuk membahas “**Gerakan *Influencer* dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah (Studi pada Ibu-Ibu Aktivistis Bank Sampah RW 06 Kelurahan Tugu, Depok)**”.

B. Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian yang akan diteliti yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana perempuan bisa sebagai *influencer* dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah?
2. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan penelitian dengan memberikan batasan dalam pengumpulan data lalu data tersebut diolah secara mendalam. Adapun fokus penelitian antara lain:

1. Perempuan bisa sebagai *influencer* dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.
 - a. Mengajak anggota keluarga dan masyarakat untuk ikut mengelola lingkungan
 - b. Mengikuti pelatihan dalam program Bank Sampah RW 06
2. Pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.
 - a. Proses pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah RW 06.

- b. Prinsip pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam Bank Sampah RW 06

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul “Gerakan *Influencer* dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah (Studi pada Ibu-Ibu Aktivis Bank Sampah RW 06 Kelurahan Tugu, Depok)” antara lain:

- 1) Untuk mengetahui perempuan bisa sebagai *influencer* dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.
- 2) Untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu sosial, khususnya Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan terutama dalam hal gerakan *influencer* dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitiannya sehingga gerakan *influencer* dalam pemberdayaan masyarakat dapat menjadi luas cakupannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Influencer

Pramudyatama dalam laman webnya mengungkapkan bahwa *influencer* adalah seseorang atau sekelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam memberikan pengaruh terhadap orang lain dalam melakukan suatu tindakan (Pramudyatama, 2020). Pada definisi lain, ditulis oleh Garjito di webnya bahwa *influencer* adalah seorang yang dengan kapasitas yang dimilikinya maka dapat mempengaruhi suatu tindakan orang lain (Garjito, 2020). Kapasitas tersebut dapat berupa pengetahuan yang dimiliki, otoritas, posisi, dan hubungan terhadap audiens. *Influencer* diharapkan dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang. Maka dapat dikatakan, *influencer* juga seorang yang mampu mengubah cara pandang/pemikiran dan perilaku orang lain yang akan berdampak pada kehidupannya. Kategori *influencer* dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya dari kalangan masyarakat hingga kalangan artis.

Dari definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *influencer* adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengubah pola pikir, perilaku, dan tindakan seseorang yang akan berdampak pada kehidupannya.

2. Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*)

a. Pengertian Gerakan Sosial Baru

Menurut Zurcher dan Snow, gerakan sosial adalah sebuah kegiatan yang sifatnya kolektif dalam mengekspresikan tingkat kepedulian yang tinggi tentang beberapa isu tertentu (Andi Haris dkk, 2019: 17). Toch mengemukakan bahwa gerakan sosial adalah suatu usaha sejumlah individu

yang secara kolektif bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam suatu masyarakat (Andi Haris dkk, 2019: 17). Istilah Gerakan Sosial Baru digunakan secara meluas dengan merujuk pada fenomena gerakan sosial yang muncul sejak pertengahan 1960-an di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, yang telah memasuki era ekonomi pasca-industrial. Para ahli mengamati Gerakan Sosial Baru ini dalam dua hal. Pertama, Gerakan Sosial Baru memiliki karakter yang baru bahkan unik. Kedua, menurut Pichardo dan Singh adalah pengetahuan baru yang dihasilkan dari riset sehingga membawanya menjadi suatu paradigma (Suharko, 2006: 8). Menurut Nash, Gerakan Sosial Baru lebih berpusat pada perubahan-perubahan dalam gaya hidup dan kebudayaan daripada mendorong perubahan-perubahan spesifik dalam kebijakan publik atau perubahan ekonomi seperti gerakan lingkungan, anti perang, perdamaian, dan sejenisnya (Suharko, 2006: 9).

b. Ciri-Ciri Gerakan Sosial Baru

Menurut Singh (Andina Prasetya dkk, 2019: 56–57), ciri-ciri yang menonjol pada Gerakan Sosial Baru dibandingkan dengan Gerakan Sosial Lama antara lain:

- 1) Gerakan Sosial Baru menanggalkan orientasi ideologis yang melekat kuat pada Gerakan Sosial Lama seperti pada antikapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Gerakan Sosial Baru menolak asumsi Marxian bahwa semua perjuangan dan pengelompokan didasarkan atas konsep kelas.

- 2) Taktik dan pengorganisasian Gerakan Sosial Baru umumnya tidak lagi mengikuti model pengorganisasian serikat buruh industri dan model politik kepartaian. Gerakan Sosial Baru lebih memilih hubungan di luar politik normal, menggunakan taktik yang mengganggu (disruptive), dan memobilisasi opini publik untuk mendapatkan daya tawar politik.
- 3) Partisipan Gerakan Sosial Baru berasal dari berbagai basis sosial yang memiliki kategori-kategori sosial seperti gender, pendidikan, okupasi dan kelas. Mereka tidak terpusat pada penggolongan tertentu seperti kaum proletar, petani, dan buruh, seperti aktor-aktor Gerakan Sosial Lama yang biasanya melibatkan kaum marginal dan teralienasi. Para aktor Gerakan Sosial Baru berjuang melintasi sekat-sekat sosial demi kepentingan kemanusiaan.
- 4) Medan atau area aksi-aksi Gerakan Sosial Baru juga melintasi batas-batas region: dari aras lokal hingga internasional, sehingga mewujudkan menjadi gerakan transnasional. Karena itu pula strategi dan cara mobilisasi mereka pun bersifat global.

c. Tipe-Tipe Gerakan Sosial

Menurut Cohen (Andi Haris dkk, 2019: 20–22), gerakan sosial terbagi ke dalam beberapa tipe antara lain:

- 1) Gerakan ekspresif. Dalam masyarakat, seringkali ingin mengungkapkan (mengekspresikan) berbagai keinginannya untuk mendapat perhatian dan simpati publik.

- 2) Gerakan regresif. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang sekarang ke keadaan sebelumnya. Dengan kata lain, gerakan ini sebagai bentuk rasa kekecewaan terhadap apa yang terjadi saat ini.
- 3) Gerakan progresif. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan seseorang.
- 4) Gerakan reformis. Gerakan ini lebih ditujukan pada terciptanya perubahan dan pembaruan aspek dalam masyarakat.
- 5) Gerakan revolusioner. Gerakan ini menuntut perubahan yang bersifat total dan radikal terhadap seluruh kehidupan manusia dan tatanan sosial yang ada.
- 6) Gerakan utopian. Konteks pada gerakan sosial ini dilakukan pada sekelompok orang yang ingin dianggap lebih baik dan ideal dari orang lain.
- 7) Gerakan migrasi. Masyarakat yang melakukan gerakan ini merasa tidak puas terhadap kondisi sosial ekonomi sekarang sehingga memutuskan untuk berpindah ke suatu wilayah lain dengan harapan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “*Empowerment*” dan dengan kata dasar “*daya*” yang memiliki arti “kekuatan”. Istilah pemberdayaan dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an sehingga dalam perkembangannya sering dijadikan sebagai kata kunci

untuk kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat (Hamid, 2018: 9). Menurut Saifuddin dkk menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai proses untuk memfasilitasi serta mendorong masyarakat untuk menempatkan diri sebagai target utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan memiliki keterkaitan dengan *sustainable development* yang berarti sebagai “gerbong” yang membawa masyarakat untuk ke tahap selanjutnya baik itu secara ekonomi, sosial, dan ekologi yang dinamis (Saifuddin Yunus dkk, 2017: 6).

Menurut Mardikanto dan Soebiato, pemberdayaan adalah sebuah proses dimana mengacu pada kemampuan untuk berpartisipasi, mendapatkan kesempatan, dan mengakses sumber daya dan layanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup (Hamid, 2018: 10). Proses yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan. Menurut Gunawan, pemberdayaan adalah suatu kelompok masyarakat yang dapat mengorganisasikan diri dalam membentuk perencanaan dan bertindak secara bersama, memecahkan masalah sosial, dan memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Hamid, 2018: 10).

Sobirin mengemukakan lima definisi pemberdayaan dengan penjelasan yang lebih bermakna (Bahri, 2013: 20). Pertama, pemberdayaan suatu proses yang dapat mengubah status dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Kedua, pemberdayaan adalah suatu metode yang berfungsi sebagai sarana

pendekatan bagi masyarakat untuk tampil dalam berpendapat. Ketiga, pemberdayaan adalah program yang terdapat beberapa tahapan untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Keempat, pemberdayaan adalah gerakan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pembangunan. Kelima, pemberdayaan adalah pemberian otorisasi yang memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat rencana, tindakan, dan usaha secara bersama untuk menuju tujuan yang diharapkan.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan (Bahri, 2013: 23). Sebagai proses, suatu rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi atau hasil akhir yang diharapkan oleh sebuah perubahan sosial. Dalam hal ini bahwa kelompok lemah disini bukan hanya dari segi ekonomi saja, tetapi dapat dilihat dari berbagai lingkup. seperti lemah dalam segi pengetahuan, pengalaman dan lain-lain. Oleh karena itu, masyarakat harus difasilitasi agar dapat memiliki kemampuan sehingga terampil dalam suatu kegiatan pemberdayaan.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program disusun dengan sendiri oleh masyarakat, dapat memenuhi apa yang

menjadi kebutuhan masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat serta berbagai pihak yang terlibat didalamnya seperti instansi pemerintah, LSM, swasta, dan lainnya (Saifuddin Yunus dkk, 2017: 6–7).

c. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses dalam pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang menggunakan sumber daya dengan sebaik mungkin. Dalam prosesnya, masyarakat adalah target utama atau *people or community centered development* (Saifuddin Yunus dkk, 2017: 6). Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (Bahri, 2013: 30–32) menekankan bahwa pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan” sehingga dalam prosesnya berlangsung dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Berikut adalah tiga tahapan dalam proses pemberdayaan antara lain:

1) Penyadaran

Pada tahap ini masyarakat yang dijadikan target untuk diberdayakan, diberikan “pemahaman” dalam bentuk pemberian penyadaran sehingga terbentuk sikap yang positif. Pemberian penyadaran dapat berupa pengetahuan yang bersifat *kognisi, belief, dan healing*.

2) Pengkapasitasan

Nama lain dari pengkapasitasan ialah “*capacity building*” atau Bahasa sederhananya adalah “memampukan”. Pengkapasitasan adalah memberikan pengetahuan dan kepercayaan kepada individu atau

kelompok terhadap kemampuan yang mereka miliki. Kegiatan ini dapat berupa *training*, workshop, seminar, dan lain-lain.

3) Pemberian daya

Individu atau kelompok diberikan daya, kekuasaan, kesempatan, dan otoritas dari apa yang mereka miliki. Proses dalam pemberian ini disesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki.

d. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan diharuskan untuk memiliki prinsip agar keberhasilan suatu program dapat tercapai dengan benar dan tepat. Menurut Aswas (Hamid, 2018: 17) beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain:

- 1) Pemberdayaan dilakukan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan penuh demokratis.
- 2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.
- 3) Masyarakat adalah subyek utama dalam target kegiatan pemberdayaan.
- 4) Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, karena hal itu merupakan modal sosial dalam pembangunan.
- 5) Proses pemberdayaan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- 6) Memperhatikan keragaman karakter, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat telah turun-temurun.

- 7) Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya aspek ekonomi dan sosial.
- 8) Tidak ada unsur diskriminasi terhadap perempuan.
- 9) Dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.
- 10) Masyarakat dilibatkan secara aktif baik dari fisik (materi, tenaga, bahan) maupun non fisik (saran, waktu, dukungan).
- 11) Agen pemberdayaan yang bertindak sebagai fasilitator diharuskan sesuai kemampuannya dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat.

e. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto (Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E.Nainggol, 2019:

13–14) terdapat tujuh tahapan dalam pemberdayaan masyarakat antara lain:

1) Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, terdapat dua tahapan yang harus dikerjakan. Pertama, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*. Kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara non direktif. Hal ini sangat penting agar tujuan dari suatu program pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

2) Tahap Pengkajian (Assessment)

Pada tahap ini, dapat dilakukan masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. Petugas harus mengetahui apa yang dibutuhkan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien. Dengan hal tersebut, maka

program akan tepat sasaran, yang berarti sesuai dengan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini, petugas bertindak sebagai “*exchange agent*” atau agen perubahan yang secara aktif untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam memikirkan tentang masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk memikirkan ide mengenai beberapa alternatif program atau kegiatan yang dapat dilakukan. Alternatif program yang akan dipilih nanti dapat memperlihatkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini, agen perubahan memberikan bantuan kepada masing-masing kelompok dalam merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu, petugas juga membantu dalam membentuk gagasan secara tertulis, jika ada hubungannya dengan pembuatan proposal yang akan diberikan kepada pemberi dana. Pemberi dana akan memahami bagaimana program, tujuan, dan sasaran yang akan dilakukan oleh pemberdayaan masyarakat tersebut.

5) Tahap “Implementasi” Program atau Kegiatan

Dalam upaya melaksanakan program atau kegiatan maka diawali dengan sosialisasi agar tujuan dari pemberdayaan masyarakat tidak salah sasaran. Petugas dan masyarakat harus memiliki kerja sama dan itu merupakan hal yang penting. Selain itu, diharapkan juga untuk menjaga keberlangsungan program yang telah berjalan.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan proses pengawasan dari masyarakat dan petugas program pemberdayaan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, maka diharapkan akan terbentuk suatu kelompok pengawasan secara internal. Pada tahap ini akan terlihat secara jelas keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat apakah tercapai atau tidak dan kendala-kendala yang dihadapi sebagai tantangan baru bagi periode selanjutnya.

7) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Program yang sedang berjalan segera diberhentikan karena masyarakat sudah mampu mengelola dengan baik.

4. Program Bank Sampah

a. Pengertian Program Bank Sampah

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah adalah tempat atau lokasi

yang digunakan untuk mengumpulkan, memilah sampah yang dapat didaur ulang sehingga dapat memiliki nilai ekonomi (Lestari, 2019: 14–15). Artinya bahwa bank sampah adalah tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Selain itu, bank sampah sebagai sistem pengolahan sampah kering yang mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk berperan aktif di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat akan terbentuk perilaku yang peduli terhadap lingkungan.

Program bank sampah memiliki konsep 3R, yaitu *reuse*, *reduce*, dan *recycle*. *Reuse* adalah upaya dalam menggunakan kembali barang-barang yang terbuat dari bahan plastik. *Reduce* adalah upaya untuk meminimalisir pemakaian atau pembelian barang-barang yang terbuat dari bahan plastik. *Recycle* adalah upaya mendaur ulang barang-barang, khususnya yang sekali pakai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Purwaningrum bahwa dari konsep 3R ini diharapkan masyarakat dapat memilah sampah plastik dan menggunakan kembali barang-barang yang masih berfungsi dengan baik (Purwaningrum, 2016: 144).

b. Tujuan dan Manfaat Program Bank Sampah

Pendirian bank sampah tentunya memiliki tujuan bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai tata cara pengelolaan sampah. Selain itu, bank sampah merupakan kegiatan yang bersifat “*social engineering*” yang mengajarkan kepada masyarakat dalam

memilah sampah secara bijak sehingga akan timbul kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Bank sampah juga bertujuan untuk mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) sebisa mungkin diterapkan pada bank sampah, agar tujuan akhir dari kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia dapat terlaksana dengan baik (Lestari, 2019: 42–45).

Adanya program bank sampah dapat membawa manfaat untuk masyarakat. Selain menambah keterampilan dan pengetahuan mengenai cara pengelolaan sampah, masyarakat juga akan mendapatkan penghasilan dari mengumpulkan sampah.

5. Perempuan dalam Mengelola Lingkungan

Menurut Ainul Mardiyah, peran perempuan memberikan pengaruh besar dalam masyarakat karena perempuan dapat dikatakan sebagai agen perubahan yang berperan dalam meningkatkan lingkungan hidup yang berkualitas (Saleh, 2014: 249). Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam mengelola lingkungan, diantaranya:

1. Meminimalisir penggunaan kosmetik dalam proporsi yang besar, sehingga sisa-sisa produk kosmetik bisa dibuang pada tempatnya atau dikelola dengan mendaur ulang.
2. Pemakaian deterjen yang tidak berlebihan, dan meninjau air limbah yang dihasilkan tidak langsung dibuang ke tanah melainkan ditampung pada wadah tertentu.

3. Menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan serta menggunakan botol minum yang dibawa dari rumah sehingga dapat meminimalisir penggunaan botol minum plastik.
4. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan dapat mengajak anggota keluarga untuk memisahkan sampah kering dan sampah basah dengan memiliki tempat sampah yang berbeda agar memudahkan dalam membuang sampah. Selain itu, membuang sampah basah bisa dikubur di tanah sedangkan sampah kering dapat didaur ulang.
5. Selain menjadi ibu rumah tangga, perempuan pun menjadi pendidik untuk anak-anaknya. Maka, perempuan dapat mengajarkan anak-anaknya untuk peduli terhadap lingkungan.
6. Perempuan dapat mengajak anggota keluarganya untuk menanam di sekitar rumah.
7. Perempuan ikut bergabung dalam organisasi bidang lingkungan dan mensosialisasi ke sesamanya, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perempuan lain.
8. Perempuan dapat memanfaatkan sampah-sampah menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai manfaat sehingga dapat menghasilkan uang.
9. Perempuan dapat menjadi pelopor untuk mendirikan komunitas peduli lingkungan yang mengajak perempuan lain untuk mengelola lingkungan sehingga lingkungan sekitar dapat dilestarikan. Informasi tersebut bisa disalurkan secara langsung maupun melalui sosial media.

F. Penelitian yang Relevan

Peneliti memiliki beberapa referensi dari penelitian lain dengan maksud untuk membandingkan fokus penelitian, sehingga penelitian yang relevan dengan penelitian ini akan dikelompokkan di tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ding Li, Luman Zhao, Shuang Ma, Shuai Shao, Lixiao Zhang. 2018.	<i>“What Influences An Individual’s Pro-Environmental Behavior? A Literature Review”</i>	Hasil dari penelitian ini adalah identifikasi faktor-faktor penentu gerakan peduli lingkungan yang akan bermanfaat dalam merumuskan kebijakan efektif sebagai upaya perlindungan alam oleh masyarakat.	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai faktor-faktor yang memiliki kecenderungan dalam peduli terhadap lingkungan.	Perbedaan pada penelitian yang akan diteliti adalah metode penelitian, tempat penelitian, dan fokus penelitian. Ding Li, dkk membahas siapa saja yang dapat mempengaruhi individu dalam menunjukkan perilaku yang peduli terhadap lingkungan. Sedangkan, peneliti berfokus pada satu faktor yaitu <i>influencer</i> pada perempuan.

<p>Nur Fadhilah dan Ni'matun Naharin. 2017.</p>	<p><i>“Perempuan dan Konservasi Lingkungan: Studi Bank Sampah Berlian Malang Jawa Timur”</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekofeminisme dan fiqh lingkungan melekat pada perempuan sehingga pemberdayaan masyarakat terus dikembangkan.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan meneliti pada ibu-ibu aktivis bank sampah.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian yang akan diteliti adalah tempat penelitian, dan fokus penelitian. Fokus penelitian Nur Fadhilah dkk membahas mengenai peran perempuan dalam perspektif ekofeminisme dan fiqh lingkungan. Sedangkan peneliti membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.</p>
<p>Ika Wijayanti, Nila Kusuma, Oryza Pneumatica I, Nuning Juniarsih. 2019.</p>	<p><i>“Gerakan Ekofeminisme dalam Pemberdayaan Perempuan Pengolah Limbah (Studi</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah gerakan ekofeminisme sebagai langkah upaya dalam menjaga dan</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah pada metode penelitian dan meneliti pada</p>	<p>Perbedaan pada penelitian yang akan diteliti adalah tempat penelitian dan fokus penelitian. Penelitian Ika</p>

	<i>Pada Komunitas Pengolah Limbah di Desa Narmada)</i> ”	melindungi lingkungan.	ibu-ibu aktivis bank sampah.	Wijayanti, dkk membahas mengenai keterkaitan ekofeminisme pada diri anggota bank sampah.
--	--	------------------------	------------------------------	--

